

GAMBARAN IMPLEMENTASI PENDEKATAN *ONE HEALTH* DALAM PENGENDALIAN RABIES DI KABUPATEN KUPANG

Stefania K.P.Laku Loi^{1*}, Galuh W.K Dyah Larasati², Tasalina Y. P Gustam³,
Apris A. Adu⁴

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3,4}

*Corresponding Author : stenylaku009@gmail.com

ABSTRAK

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan *One Health* yang mengintegrasikan sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan merupakan strategi penting dalam pengendalian rabies. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kesehatan dari berbagai aspek (komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi) dalam pengendalian penyakit rabies di Kabupaten Kupang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Puskesmas, Balai Kesehatan Hewan, Kepala Desa dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *one health* dalam pengendalian penyakit rabies di Kabupaten Kupang sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum dalam implementasi *one health* dalam pengendalian penyakit rabies di Kabupaten Kupang dan masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya non manusia serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam implementasi *one health* dalam pengendalian penyakit rabies di Kabupaten Kupang. Kajian ini merekomendasikan penguatan kerjasama lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya dan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang *one health* untuk pengendalian Rabies di Kabupaten Kupang.

Kata kunci : Kabupaten Kupang, *one health*, pengendalian penyakit, rabies

ABSTRACT

Rabies is a zoonotic disease that is still a public health problem in Indonesian, one of which is in East Nusa Tenggara Province. The One Health approach that integrates human, animal and environmental health sectors is an important strategy in controlling rabies. This study aims to determine the description of the implementation of health from various aspects (communication, resources, bureaucratic structure and disposition) in controlling rabies in Kupang Regency. The Method used is a qualitative descriptive method with in-depth interview techniques to informants from the Kupang District Health, Kupang District Animal Husbandry office, Health Centers, Animal Health Centers, Village Heads and the community. The result from this research indicate that the implementation of one health in controlling Rabies in Kupang Regency has been carried out well but not optimally. This is because there is still no legal umbrella in implementation of one health in controlling Rabies in Kupang Regency and there is still a lack of human resources and in lack of community involvement in the implementation of one health in controlling Rabies in Kupang Regency. This study recommends strengthening cross-sector collaboration increasing resource capacity and intensive socialization to community about one health to controlling Rabies in Kupang Regency.

Keywords : rabies, *one health*, disease control, Kupang Regency

PENDAHULUAN

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas termasuk manusia. Virus dapat menginfeksi manusia atau hewan melalui cakaran, gigitan dan air liur hewan yang terinfeksi (Yulianita et al., 2023). Salah satu provinsi yang belum bebas rabies adalah Provinsi NTT. Berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO) tahun

2024, rabies masih tergolong sebagai permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di lebih dari 150 negara, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Setiap tahunnya, penyakit ini menyebabkan sekitar 59.000 kematian, dengan 95% kasus dilaporkan terjadi di kedua wilayah tersebut. Sebagian besar kasus rabies (98%) ditularkan melalui gigitan anjing, sementara sisanya (2%) berasal dari kera dan kucing. Menurut data Kemenkes RI, angka kematian akibat rabies di Indonesia berkisar antara 100 hingga 156 kasus per tahun. Pada tahun 2020 tercatat 82.634 kasus GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) dengan 40 kematian, menurun menjadi 57.672 kasus pada 2021 namun terjadi peningkatan kematian menjadi 62 kasus. Tahun 2022, kasus GHPR secara signifikan meningkat menjadi 104.229 dengan 102 kematian (Kemenkes RI, 2022).

Kasus rabies di Provinsi NTT 100% disebabkan oleh hewan anjing. Berdasarkan data, Kabupaten Kupang menjadi wilayah yang mengalami peningkatan kasus GHPR dan kasus kematian akibat rabies. Tahun 2023, jumlah kasus GHPR mencapai 292 dan meningkat menjadi 342 kasus di tahun 2024, dengan lima kasus kematian. Kasus kematian akibat rabies tersebut terjadi di Desa Nunmafo dan Desa Muke (Kecamatan Amabi Oefeto Timur), Desa Sahraen (Kecamatan Amarasi Selatan), serta Desa Sillu (Kecamatan Fatuleu) (Dinkes NTT, 2024). Rabies merupakan penyakit dengan tingkat kematian (Case Fatality Rate) sebesar 100%, yang berarti seluruh individu yang terinfeksi rabies dari hewan positif akan mengalami kematian (WHO, 2024). Meski demikian, rabies dapat dicegah dan dikendalikan. Upaya pencegahan dilakukan melalui vaksinasi massal pada anjing sebagai sumber penularan utama, serta edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik anjing, mengenai perilaku hewan untuk mencegah gigitan. Vaksinasi pra pajanan (*pre-exposure prophylaxis*) atau PEP juga dianjurkan bagi individu dengan risiko tinggi, seperti dokter hewan, pemilik, dan pelatih anjing (US CDC & WHO, 2024).

Rabies merupakan penyakit zoonosis dapat dikendalikan dan dapat dicegah dengan menggunakan pendekatan *one health*. Pendekatan *one health* melibatkan kerjasama sinergis lintas sektoral di tingkat lokal, nasional dan global (Richards et al., 2019). Menurut World Health Organization (2019), pendekatan *one health* merupakan strategi terpadu yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan *one health* telah terbukti efektif dapat meminimalisir kasus GHPR yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia (FAO, 2020). Penelitian oleh Tenzin et al. (2016) dalam Acharya et al. (2020) menunjukkan bahwa Bangladesh berhasil menerapkan pendekatan multisektoral *one health* di wilayah pedesaan dan mengintegrasikannya secara nasional untuk menekan angka kematian akibat rabies. Hasilnya, jumlah kematian akibat rabies menurun signifikan dari 1.500 kasus pada tahun 2012 menjadi 200 kasus pada tahun 2015. Pendekatan *one health* terbukti efektif dalam mengurangi jumlah korban gigitan hewan penular rabies di Ketapang, dan berhasil diterapkan di Boyolali dalam penanganan 22 kasus suspek rabies pada tahun 2017 melalui kerja sama lintas sektor (FAO, 2020).

Kabupaten Kupang sebagai salah satu wilayah dengan kasus GHPR yang tinggi di provinsi NTT, perlu menerapkan pendekatan *one health* untuk menekan peningkatan jumlah kasus GHPR agar tidak semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan *one health* sebagai upaya pengendalian rabies di Kabupaten Kupang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui gambaran implementasi *one health* dari berbagai aspek yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-

kata tertulis yang merupakan deskripsi tentang suatu hal. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kupang dengan lokasi penelitian, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Puskesmas Tarus, Puskesmas Camplong, Puskesmas Sonraen, Puskesmas Babau, Puskesmas Camplong, Puskesmas Tarus, Desa Sillu. Pengumpulan data dalam wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai informan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Kepala Puskesmas Camplong, Kepala Puskesmas Sonraen, Penanggungjawab Rabies Puskesmas Tarus, Kepala Puskesmas Tarus, Kepala Puskesmas Babau, Kepala Puskesmas Camplong, Kepala Desa Sahraen, Kepala Desa Sillu dan masyarakat. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan tema atau variabel dalam penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian, Penulis telah lulus dan mendapatkan sertifikat layak etik.

HASIL

Komunikasi

Kejelasan

"Iya, Kalau terkait dengan hal itu, itu sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Dari pihak kecamatan sudah turun tangan dan sampai di kabupaten juga baik dari Dinas Kesehatan dan juga Dinas Peternakan dan sudah jelas. Sudah jelas, terkait dengan Rabies ini."(TNR).

"Sudah, sudah pernah. Dan sejauh ini kaka, informasi yang diberikan itu emm, sudah jelas kalau Rabies itu berbahaya."(NN).

Transisi

"ehh kalau ini kita waktu terjadi peningkatan kasus itu,ehh bersama-sama dengan badan bencana dan bappeda itu, emm apa,emm itu langsung sosialisasi di camat mereka terus dengan lintas sektor yanag lain terus dengan Dinas Provinsi juga seperti itu,. Jadi langsung sosialisasi ke Kecamatan. Terus kami dengan ini eee undang camat semua juga untuk sosialisasi tentang rabies."(KRK).

"Komunikasi dengan Masyarakat teman-teman di promkes kan umumnya mereka adalah basic kesehatan masyarakat jadi mereka yang bertugas untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan tentang Rabies ini (SGT)

"Iya,media lain itu seperti Media Sosial, Media Poster, media elektronik (Radio)"(MDM).

Kalau untuk media, ke setiap Puskesmas. Kalau kita waktu sosialisasi itu tidak ya. Cuman Penyampaian saja dan diseminasi begitu kepada camat dan pemangku kebijakan. Nah itu diharapkan Puskesmas itu juga turun, itu sosialisasi juga. Ehh jadi itu sudah dilaksanakan oleh Puskesmas, dan kerja sama lintas sektor terus ada kegiatan Posyandu juga disampaikan. Kalo di Puskesmas itu ya yang kita ada poster dan ada juga, ya ada Poster lah intinya."(KRK).

" Iya ada. Namanya grup WA nya penanggulangan Rabies. Jadi disitu ada beberapa sektor, ada dari kesehatan manusia, dan juga dari kami keswan."(RA).

"Iya Ibu Baik, Ibu. Sejauh ini dari jawaban-jawaban Ibu kepada teman-teman tadi, berarti ada penggunaan media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan juga penyebaran melalui di gereja, Ibu."(RA).

Konsistensi

Oiaaa... biasa setiap tiga bulan tu ada lokakarya lintas sektor. Pertemuan yang melibatkan berbagai lintas sektor dari kecamatan, dari pendidikan dari kesehatan hewan.

Pokoknya lintas sektor, nah disitu tu yang dipaparkan beberapa program dan juga sosialisasi seperti adanya kasus rabies, itu per 3 bulan sekali.”(SGT).

“Itu juga menjadi salah satu. Indikator Kinerja Jadi, salah satunya semua kita bisa tangani dengan cepat. Termasuk rabies jadi itu ada. Kerja tim. Kolaborasi lintas sektor. Ada juga per tiga bulan diadakan rapat koordinasi lintas sektor.”(ESS).

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Kesehatan Manusia

“SDM-nya cukup memadai. Karena saya punya tenaga-tenaga nakes, narkes dan named yang cukup profesional.”(RA).

“Kalau untuk rabies. Saya rasa cukup. Karena kita ada dua dokter. Kalau kita pakai standar. Kita juga rawat. Sudah diatas tujuh orang. Dokter juga ada dua. Tidak ada masalah dalam kendalian. Kasus rabies.”(ESS).

Sumber Daya Manusia Kesehatan Hewan

“Oke, kalau untuk memadai sih, luas terlalu, terlalu luas. Untuk Puskesmas itu kan ada kriterianya, skalanya, berapa jumlah hewan yang ditangani dan untuk saat ini yah memadai aja.”(DRM).

“Sangat kurang. Idealnya, Puskesmas itu berupa UPT. Unit Pelaksana Teknis. Di bawah dinas. Tapi dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang... Harusnya 24 Puskesmas, kan? Satu Puskesmas di satu kecamatan. Baru ada 17 Puskesmas. Tapi belum ada satu pun yang berbentuk UPT. Dari 17 itu yang paling komplit itu tu Kupang Timur, Kupang Tengah, Kupang Barat, Fatuleu. Itu su paling bagus lah. Karena dia di jalur Timor raya, di jalur utama. Itu paling baik. Bahkan ada yang satu Puskesmas, satu petugas.”(HST).

Sumber Daya Manusia Non Kesehatan

“Kalau vaksin cukup untuk manusia juga cukup.”(KRK)

“Iya mencukupi, setiap kali permintaan vaksin juga sekalian permintaan dengan dia punya apa barang-barang yang sekali pakai, misalnya jarum suntik.”(SGT).

“Sejauh ini vaksin Mencukupi”(MDM)

“Sejauh ini. Ketersediaan aman. Ketersediaan aman, Bapak. Untuk bulan Desember 2024-Bulan Februari 2025, itu ada 10.000 Dosis Vaksin yang diberikan itu...”(HST).

“Kalau untuk mencukupi yah saya bilang tidak mencukupi, karena kita turun ke desa-desa, ke rumah-rumah, itu yang perlu anggaran eh itu mungkin merupakan tanggung jawab moral untuk menjaga eh apa namanya, kesehatan hewan di wilayah tersebut, jadi ya itu kita lakukan. Anggaran operasional dan lainnya itu sudah di atur, ya kita menerima saja. , saat di lapangan belum ada biaya, belum ada operasional.”(DRM).

“Ini kalau untuk rabies ini kan baru aktif kembali tahun lalu, jadi ya masih belum ada pendanaan apa-apa. Belum ada pendanaan apa-apa.”(SGT).

”Sejauh ini kami buat permintaan ke provinsi, Emm Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi dari kita belum ada. Kemarin kami pertemuan itu, hanya satu Kabupaten saja yang pengadaan anggaran untuk Vaksin ini, yaitu Kabupaten Belu. Emm tapi sejauh ini cukup.”(KRK)

Disposisi

Sikap Pemerintah

“Cepat tanggap, langsung keluar surat edaran Bupati mengenai penyakit rabies ini. Kita baru Soe, kejadian mersi, baru dari Soe saja Kabupaten Kupang itu sudah mengeluarkan surat edaran untuk penutupan lalu lintas ternak, lalu lintas anjing, terutama di pasar-pasar. Pasar Lili Camplong kan biasanya bebas, itu ditutup, tidak boleh anjing masuk dari luar. Seperti itu. Terus di kota juga gitu, antara kota kabupaten. Jadi tidak boleh ada perpindahan anjing HPR

dari wilayah Kabupaten Kupang ke luar apalagi dari luar masuk ke Kabupaten Kupang. Sudah langsung ada surat edarannya. "(TFM).

"Artinya untuk penanganan dari pemerintah Kabupaten, artinya mereka selalu arahkan kalau bisa tangani ini dengan secara cepat. Karena ini, rabies ini sangat-sangat mematikan. "(NM).

Sikap Petugas Kesehatan

"Iya, jadi semua terlibat, sesuai dengan porsinya ya, cuman karena rabies ini ada di Kami, dibagian P2P, dan juga di bidang Yankes juga dan juga di Rumah sakit semua terlibat sesuai dengan porsinya masing-masing."(KRK)

"Siap, kalau untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kupang, dan di Desa Sillu mereka punya dedikasi yang tinggi untuk memperhatikan masyarakat yang ada di Desa Sillu dan untuk memberantas rabies di Desa Sillu, sehingga teman-teman atau masyarakat yang terkena gigitan anjing, mereka ambil langkah dengan cepat, memang ada saja kasus yang selama ini, emm contohnya dapat gigit dari anjing itu, dari Dinas terkait mengambil langkah dengan cepat, dan langsung dibawa ke Faskes."(YAM).

"Sangat berdedikasi ya. Ini terbukti dengan pada saat turun ke lapangan, saat di lapangan belum ada biaya, belum ada operasional, itu mereka sudah turun ke lapangan. Biasanya kan kalau ini, harus kasih operasional dulu baru bisa. Tapi kalo mereka sudah turun langsung, mereka turun terus tanpa pernah ada bilang oh di daerah ini ada vaksinasi jadwalnya udah dibuat, mereka selalu datang, tidak pernah bilang tidak datang selalu memberikan jadwal, mereka hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Sekarang ya tinggal masyarakatnya saja mau di vaksin atau tidak. Dan itupun kita himbau lagi. Setelah jadwal turun, kita lakukan vaksinasi ada yang mau ada yang tidak. Kalau pun ada yang mau tapi karena ada kesibukan, ada acara, keluar kami sampaikan lagi, diluar jadwal pun akan tetap kami layani. Ya yang penting ada laporan aja."(DRM).

Sikap Masyarakat

"iya terlibat aktif. Ha'a buktinya setiap ada kena gigit, meskipun hanya cakar sa, tapi ya namanya su kontak dengan air liurnya anjing, tetap diberikan vaksin. Masyarakat juga pro aktif sih dalam melakukan vaksin. Hanya itu, soal ini sa kak, ada beberapa masyarakat yang punya anjing yang itu yang mereka masih apatis. Kadang-kadang katong tanya di Pasien yang datang, pasien bilang "itu anjing tu su biasa gigit-gigit orang "dan su kasi tau dia pu tuan, hanya dia pu tuan ni yang masih apatis begitu, masih cuek-cuek begitu. Sudah dilaporkan di RT, terus RT tindak lanjuti ke Poskeswan seperti itu."(SGT).

"Ya kalo itu Pemerintah masih mendukung kegiatan ini tetapi sebagian masyarakat masih belum mau ikut dalam program ini"(MDM).

"Kendalanya ya masyarakat ini sendiri menganggap bahwa rabies ini biasa-biasa saja sehingga jika ada informasi dari pihak terkait dan pemerintah setempat saja mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa, sehingga seperti contoh seperti ada masyarakat yang mempunyai anjing malah ada pemeliharaan bahkan sampai 2-3 ekor anjing."(YAM).

Birokrasi

Ketersediaan Standar Operasional Prosedur

"Tidak ada SOP. Karena dengan adanya itu rabies waktu itu, ya pokoknya kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Peternakan ini artinya selalu seara untuk melayani masyarakat."(NM).

"Buat sekarang sih, kalau kita lapor kecamatan, ya, karena Puskesmas Tarus di kecamatan, tidak ada sih tata caranya dia mengalir begitu saja sih. Tapi itu tadi, kalau di

tingkat pemerintah Kabupaten Kupang, di pusat sana, dia sudah ada satgas. Kalau itu kan lebih ke birokrasi.”(TFM).

“Jadi waktu itu seingat-beta bersurat secara resmi, selain meneruskan pesan dari SK KLB itu dari Pemda Bju ada edaran khusus dari Puskeswan, apa yang harus dilakukan. Ini status KLB, misalnya jika terjadi, ingatkan apa taktis, pergerakan taktis untuk pencegahan rabies dengan informasi vaksinasi.”(HST).

“Iya, ada. Terus ehh ditunjangi lagi dengan di Kecamatan itu kayak ada, ada terusan dari Perbup itu juga untuk penegasan ke sampai ke tingkat desa.”(RA).

PEMBAHASAN

Komunikasi

Dalam melakukan komunikasi lintas sektor dalam implementasi *one health* dalam pengendalian rabies di Kabupaten Kupang, sudah memiliki forum komunikasi berupa rapat koordinasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Edward III bahwa untuk mencapai keberhasilan sebuah kebijakan, dibutuhkan konsistensi dalam melakukan komunikasi. Selain itu, sudah terdapat media yang menjembatani pertukaran informasi yang dapat dilakukan secara cepat dan efisien yaitu group WhatsApp yang bernama Satuan Tugas Pengendalian Rabies di Kabupaten Kupang. Teknologi informasi dalam hal komunikasi dengan menggunakan teknologi media merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk digunakan dalam menyampaikan informasi antar instansi pemerintah dan juga menghemat biaya operasional karena dapat dilakukan secara online (Hidayat & Lubis, 2019).

Menurut (Gongal & Wright, 2021) sebagian besar korban rabies dikarenakan kecerobohan, ketidaktahuan, dan ketersediaan layanan kesehatan primer yang tidak memadai serta sosialisasi pengendalian rabies melalui reservoir hewan yang lamban. Dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat, Petugas kesehatan menggunakan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rabies dan juga menggunakan media cetak. salah satu bentuk pendekatan *one health* untuk mengendalikan rabies di Kabupaten Kupang adalah dengan memberikan edukasi seperti sosialisasi kepada masyarakat (Gelolodo et al., 2024).

Kesadaran dan edukasi masyarakat menjadi komponen kunci dalam penerapan pendekatan *One Health*. Kampanye edukasi dan kesadaran publik perlu digalakkan untuk meningkatkan pemahaman tentang rabies dan cara pencegahannya (Mardiana et al., 2025). Menurut (Gongal & Wright, 2021) sebagian besar korban rabies dikarenakan kecerobohan, ketidaktahuan, dan ketersediaan layanan kesehatan primer yang tidak memadai serta sosialisasi pengendalian rabies melalui reservoir hewan yang lamban. Dengan adanya kegiatan edukasi ini juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penanganan luka pasca pajanan agar mampu menekan angka kematian akibat rabies (Hasanov et al., 2018). Penggunaan media seperti leaflet mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pencegahan Tuberculosis (Pratiwi et al., 2022).

Sumber Daya

Menurut Teori Edward III salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya manusia kesehatan sudah memadai namun sumber daya manusia tenaga veteriner dan vaksinator sangat kurang dari segi kuantitas. Hal ini disampaikan dalam Teori Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna karena tidak dapat menjalankan pengawasan dengan baik. keterbatasan jumlah sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena beban kerja berlebih dan

membuat kualitas kerja kurang optimal dan membuat karyawan bekerja dilaur jobdesk (Fadlurahman et al., n.d.).

Selain sumber daya manusia, menurut Teori Edward III elemen lain yang berperan untuk keberhasilan sebuah kebijakan adalah sumber daya non manusia. Dalam implementasi pendekatan *one health* dalam pengendalian rabies di Kabupaten Kupang, ketersediaan Vaksin Anti Rabies (VAR), baik untuk manusia maupun hewan sudah cukup. Dalam implementasi pendekatan *one health* dalam pengendalian rabies adalah dengan melakukan vaksinasi massal (Acharya, 2024). Vaksinasi HPR merupakan cara paling efektif untuk melakukan pencegahan dan pengendalian rabies (Wijaya et al., 2023). Vaksinasi HPR merupakan cara paling efektif untuk melakukan pencegahan dan pengendalian rabies (Wijaya et al., 2023). Vaksinasi massal anjing telah terbukti menjadi cara yang berhasil dan hemat biaya untuk menyelamatkan nyawa (Shafaati et al., 2023). Dengan kecukupan ketersediaan VAR maka dapat mengendalikan rabies di Kabupaten Kupang.

Disposisi

Menurut Teori Edward III, salah satu elemen penting untuk mencapai keberhasilan dari sebuah kebijakan adalah Disposisi atau sikap para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menanggapi implementasi *one health* dalam pengendalian rabies di Kabupaten Kupang.

Provinsi Bali melakukan berbagai upaya dalam pengendalian rabies, yaitu dengan mengeluarkan Perda Rabies Nomor 15 Tahun 2009, melakukan vaksinasi massal rutin, menyiapkan VAR di Puskesmas (Wijaya et al., 2023). Berdasarkan penemuan dilapangan, hal yang sama juga telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang sebagai upaya pengendalian rabies yaitu dengan melakukan vaksinasi massal secara rutin sesuai jadwal, menyiapkan VAR di Puskesmas, melakukan sosialisasi dan menutup akses keluar masuknya hewan melalui Pasar Lili yang ada di Kabupaten Kupang. Penanganan kasus GHPR harus dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan Puskesmas dan Puskesmas (Wijaya et al., 2023).

Upaya pengendalian infeksi rabies melalui pendekatan *one health* diperlukan agar dapat berkolaborasi antara manusia, hewan dan lingkungan (Stadley et al, 2019). Kerja sama antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik, dimana semua sektor terkait terintegrasi dalam grup SATGAS pengendalian rabies di Kabupaten Kupang. Dalam hal ini, peranan masing-masing kelompok terkait diperlukan, koordinasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas masing-masing aktor (Wijaya et al., 2023). Selain sikap pemerintah, yang perlu diperhatikan adalah sikap dan keterlibatan dari masyarakat. Dalam Acharya, 2024 mengatakan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan bergantung pada partisipasi publik. Partisipasi Publik diperkuat melalui sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran. Berdasarkan penemuan dilapangan, masyarakat bersikap acuh tak acuh dalam implementasi *one health* dalam pengendalian rabies di Kabupaten Kupang. Dengan adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat, maka pemahaman masyarakat tentang rabies dan penanggulangan rabies menjadi rendah (Wijaya et al., 2023).

Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP). Dari aspek adanya Standar Operasional Prosedur atau (SOP) di Kabupaten Kupang belum memiliki SOP dalam implementasi *one health* dalam pengendalian rabies di Kabupaten Kupang. Manfaat dari SOP adalah membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang runtut, terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan (Nabilla & Hasin, 2022). Dari Aspek Payung Hukum yang melandasi implementasi *one health* dalam pengendalian rabies, Kabupaten Kupang belum memiliki aturan dalam pengendalian rabies di Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang hanya mengeluarkan edaran berupa Surat Edaran Surat

Keputusan Bupati Kupang Nomor 428/KEP/HK/2024 tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kejadian Luar Biasa Rabies di Kabupaten Kupang. Seharusnya, sama seperti Provinsi Bali sebagai Daerah Endemis Rabies, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan tentang rabies, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No.15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies. Dengan adanya peraturan birokrasi, merupakan barrier tercapainya cakupan vaksinasi sesuai target (Wijaya et al., 2023).

Aspek kedua dalam birokrasi adalah struktur birokrasi. Menurut Edward III dalam Nugroho, menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi implementasi kebijakan Publik. Pendekatan *one health* yang digagas secara lokal untuk melaksanakan program pencegahan dan pengendalian rabies di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau (melalui pendekatan *bottom-up*), dan pemerintah pusat menginisiasi program di Kabupaten Ketapang (melalui pendekatan *top-down*) (Aptriana et al., 2022). Struktur birokrasi yang dimiliki dalam pendekatan *one health* untuk pengendalian rabies di Kabupaten Kupang telah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Artinya struktur birokrasi telah tersusun dengan baik, mulai dari instansi yang memimpin pengendalian rabies di Kabupaten Kupang yaitu Badan Pengelolaan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang, dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas dan Dinas Peternakan Kabupaten Kupang yang membawahi Pusat Kesehatan Hewan dan beberapa instansi ini disatukan dalam Satuan Tugas (SATGAS) pengendalian rabies di Kabupaten Kupang.

Ketersediaan lembaga ini dimaksudkan supaya lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing, dimana BPBD sebagai ketua satuan tugas, Dinas Kesehatan bersama dengan unit pelayanan teknis menangani Pasien yang terkenan gigitan Hewan Penular Rabies dan terkena rabies dan Dinas Peternakan dengan Puskesmas menangani Hewan Penular Rabies. Hal yang sama juga dilakukam oleh Provinsi Banten, dalam rangka pengendalian rabies di Provinsi Banten, dibentuk Tim Koordinasi Daerah (Tikorda) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sesuai dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 dalam rangka melakukan pencegahan penularan rabies di Provinsi Banten. Keberadaan Tikorda ini memastikan bahwa strategi pencegahan dan pengendalian rabies dilaksanakan secara terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait (Mardiana et al., 2025).

KESIMPULAN

Komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi dalam implementasi pendekatan *One Health* dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Kupang sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan dari segi komunikasi jika dilihat dari transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi namun belum optimal karena ada beberapa hambatan yaitu kurangnya media cetak yang dibagikan kepada masyarakat dan masih terdapat beberapa kendala yaitu banyak masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap rabies ini, dari segi sumber daya kurangnya tenaga kesehatan hewan dalam pengendalian rabies di Kabupaten Kupang. Untuk sumber daya non manusia, Vaksin Anti Rabies bagi hewan dan manusia sudah optimal, meskipun terdapat beberapa kendala yaitu belum ada anggaran (masih dalam tahap pembahasan) dari Kabupaten Kupang dalam implementasi pendekatan *one health* dalam pengendalian rabies di Kabupaten Kupang, dari segi disposisi masih memiliki beberapa kendala yaitu masih terdapat masyarakat yang tidak percaya akan rabies ini sehingga kurang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk memberantas rabies di Kabupaten Kupang dan dari segi birokrasi belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus dalam pengendalian Rabies di Kabupaten Kupang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan jurnal dan selama proses penelitian. Pihak tersebut adalah kedua Dosen Pembimbing dan Pemerintah Kabupaten Kupang yang sudah memberikan izin kepada Peneliti untuk melakukan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua informan yang sudah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi kepada Peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, K.P. *et al.* (2020) 'One-health approach: A best possible way to control rabies', *One Health*, 10(August), p. 100161. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100161>.
- Ap triana, C.D., Sudarnika, E. and Basri, C. (2022) 'Nationally and locally-initiated One Health approach in controlling rabies in West Kalimantan, Indonesia', *Veterinary World*, 15(12), pp. 2953–2961. Available at: <https://doi.org/10.14202/vetworld.2022.2953-2961>.
- CDC. (2024). *Rabies Pre Exposure Prophylaxis* dari https://www-cdc-gov.translate.google.com/rabies/hcp/prevention-recommendations/pre-exposure-prophylaxis.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada 20 Oktober 2024
- Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Kupang. (2024). Profil Dinas Peternakan
- Gelolodo, M. A., Sanam, M. U. E., Tangkonda, E., Toha, L. R. W., & Kallau, N. H. G. (2024). Edukasi Pendekatan *One Health* dalam Pencegahan Penyakit Zoonosis Rabies pada Sekolah Dasar di Kota Kupang. 8(2), 192–201.
- Gongal, G., & Wright, A. E. (2011). *Human Rabies in the WHO Southeast Asia Region: Forward Steps for Elimination. Advances in Preventive Medicine, 2011*, 1–5. <https://doi.org/10.4061/2011/383870>
- Hasanov, E., Zeynalova, S., Geleishvili, M., Maes, E., Tongren, E., Marshall, E., Banyard, A., McElhinney, L. M., Whatmore, A. M., Fooks, A. R., & Horton, D. L. (2018). *Assessing the impact of public education on a preventable zoonotic disease: Rabies. Epidemiology and Infection*, 146(2), 227–235. <https://doi.org/10.1017/S0950268817002850>
- Hidayat, S., & Lubis, M. S. I. (2019). Pengaruh Aplikasi WhatsApp Terhadap Penyebaran Informasi Kepada Pegawai Dinas Pekerja Umum Kecamatan Medan Kota (Studi Kasus di Unit Pelayanan Tugas Pekerjaan Umum Medan Kota). *Jurnal Network Media*, 2(2), 74–113.
- Luh Putu Yulianita, N., Ngurah Adisanjaya, N., & Riska Resty Wasita, R. (2023). Pemetaan Faktor Risiko Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies pada Manusia Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 9(1), 1–9.
- Mardiana, A., Maulana, D., & Stiawati, T. (2025). Implementasi Pendekatan One Health Melalui *Collaborative Governance* Dalam Pengendalian Penyakit Zoonosis Rabies Di Provinsi Banten Ari Mardiana. 9, 122–136.
- Nabilla, D. R., & Hasin, A. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Pada Departemen *Community & Academy RUN System* (PT Global Sukses Solusi Tbk). Nabila, Dian Ratna Hasin Al, 01(06), 58–75. <https://journal.uui.ac.id/selma/article/view/26602%0Ahttps://journal.uui.ac.id/selma/article/download/26602/14474>
- Pratiwi, G. D., Vita Lucy, & Paramitha. (2022). Efektifitas Penggunaan Media Leaflet Dalam Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Pencegahan Tuberkulosis. *Jurnal Ilmiah*

- Keperawatan (*Scientific Journal of Nursing*), 8(3), 8–13.
<https://doi.org/10.33023/jikep.v8i3.1153>
- Richards, S., Rusk, R., & Douma, D. (2019). *A one health approach to rabies management in Manitoba, Canada. Canadian Veterinary Journal*, 60(7), 737–743.
- Shafaati, M., Akbarpour, S., Priyanka, Saied, A. R. A., & Choudhary, O. P. (2023). *Tackling rabies by one health approach: Pitfalls on the road to global eradication. New Microbes and New Infections*, 52, 101098. <https://doi.org/10.1016/j.nmni.2023.101098>
- Sinclair, J. R. (2019). *Importance of a One Health approach in advancing global health security and the Sustainable Development Goals*. 38(1), 145–154.
<https://doi.org/10.20506/rst.38.1.2949>
- Wijaya, M. I., Giri, M. K. W., & Hendrayana, M. A. (2023). Tantangan Pencegahan Rabies Melalui Vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Daerah Pariwisata Sanur, Bali. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(02), 103–116. <https://doi.org/10.33221/jikm.v12i02.2035>
- Wijaya, M. I., Giri, M. K. W., & Hendrayana, M. A. (2023). Tantangan Pencegahan Rabies Melalui Vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Daerah Pariwisata Sanur, Bali. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(02), 103–116. <https://doi.org/10.33221/jikm.v12i02.2035>
- World Health Organization*. (2019). *One Health* dalam https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1 diakses pada 15 September 2024
- World Health Organization*. (2024). Rabies dalam <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies> diakses pada 15 September 2024